HAK ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU

Ni Made Yola Suryani, I Nyoman Suarna, I Made Putu Sujana
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Abstrak

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan deskripsi pengaturan tentang hak alimentasi anak terhadap orang tua yang diatur dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Hindu. Adapun masalah dan tujuan yang dipakai sebagai landasan adalah (1) bagaimana pengaturan hak alimentasi anak dalam Hukum Positif dan dalam Hukum Hindu, (2) bagaimana konskwensi yuridis hak alimentasi anak terhadap orang tua dalam Hukum Positif dan Hukum Hindu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif (*Normatif legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer adalah, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004, dan, Saramusccaya,. Bahan hukum sekondr yang digunakan adalah hasil penelitian (Hukum), hasil karya (Ilmiah), serta artikel-artikel, dan internet. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Bahan hukum hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara Normatif Kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari dalam hukum positif maupun hukum hindu mewajibkan seorang anak untuk memberikan pemeliharaan kepada orang tua. Namun dalam hukum Positif lebih tegas diatur dalam Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya bagaimana bentuk pemeliharaan tersebut dan sanksi bagi anak yang melalaikan kewajibannya. Sedangkan dalam Hukum Hindu yang diatur dalam Kitab Saramusccaya juga jelas menegaskan bentuk penghormatan dan pemeliharaan terhadap orang tuanya dan sanksi atau hukman jika anak melalaikan kewajibannya itu.

Kata kunci: Hak, alimentasi, anak, orang tua, hukum positif, hukum hindu.

A. Latar Belakang

Hubungan orang tua dan anak terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Dari hubungan tersebut timbul suatu hubungan hak dan kewajiban timbal balik diantara orang tua dan para keluarga sedarah dalam

garis lurus keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah disebut dengan Hak Alimentasi (Meliala, 2007:32).

Ketentuan yang hampir sama juga diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pula kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya yang menyebutkan:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal di atas tersebut menegaskan bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya. Hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Anak dalam Agama Hindu sangat penting untuk dapat melanjutkan generasipenerus dari keluarga. Kelahiran putra suputra, yakni anak yang berbudi pekerti luhur, cerdas dan bijaksana yang akan mengangkat martabat orang tua, keluarga dan masyarakat seperti dalam kitab Manawa Dharmasastra IX. 138 menyebutkan:

“Pumnamno Narakadyas Mattraya Te Pitaram Sutah, Tasmata Putra Iti Proktah Swayamewa Swayambhuwa”.

Artinya:

“Oleh karena seorang anak yang akan menyebrangkan orang tuanya dari neraka yang disebut Put (neraka lantaran tidak memiliki keturunan), oleh karena itu ia disebut putra” (G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudhartha, 2002:564).

Kewajiban anak terhadap orang tua merupakan pelaksanaan perintah Agama dan Undang-Undang. Namun pada kenyataannya seorang anak

melalaikan kewajibannya itu. Mengingat angka lanjut usia yang terlantar di negeri ini cukup tinggi, dimana kaum lanjut usia (lansia) di Tanah Air masih belum mendapatkan perhatian yang layak. Tidak sedikit lansia menghabiskan masa tuanya sendirian bahkan di jalan. Padahal, jumlah lansia di negeri ini akan terus meningkat. Seperti dalam pemaparan data oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan:

“jumlah Lansia 20,5 juta jiwa, sedangkan lansia terlantar 2,1 Juta dan 1,8 juta lansia yang berpotensi terlantar. Kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius supaya angka lansia terlantar bisa ditekan. Karena itu seluruh layanan bagi lansia menjadi kebutuhan, dan hak tersebut adalah tugas bersama untuk memaksimalkan pelayanannya, termasuk penyiapan pondok lansia. Tingginya angka lansia terlantar di Indonesia bisa menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebab, konstitusi Republik ini telah menyatakan secara tegas bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” (www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp207/08/05/337/1750328/data-kemensos-2-1-juta-lansia-di-indonesia-terlantar-dan-1-8-juta-lainnya-berpotensi-serupa, diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 17:00)

Seperti penelantaran yang dialami oleh Nenek Ajariah (70 tahun) alamat Dusun Anjani Selatan Dua, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur sebagai berikut:

“Nenek Ajariah hidup sebatang kara di gubuk reot jauh dari kata layak. Atap serta dinding pagar rumah sudah tidak mampu lagi membendung air hujan dan terik matahari. Tempat tidur sering tergenang air, terlebih saat musim hujan sekarang ini. Jika hujan turun pada malam hari, ia sering kali begadang sampai pagi. Tak bisa tidur karena air hujan merongrong hingga tempat tidurnya.

Sedih rasanya saat melihat nenek Ajariah yang mulai rapuh dan tidak berdaya di masa tuanya. belum lagi penyakit yang dialaminya, sering merasa sakit di bagian kepala dan dada. Ia tidak lagi kuat untuk berjalan. Bahkan untuk pergi buang air di toilet tetangganya yang berjarak 10 meter dari rumahnya, harus berjalan penuh perjuangan. Ya begitulah nenek Ajariah melewati sisa hidupnya di tengah kemiskinan dan kondisi kesehatan yang sudah di makan usia” (www.opsintb.com/2020/02/hidup-sebatang-kara-nenek-ajariah.html?m=1, diakses pada tanggal 18 juni 2020 pukul 13:00).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Yang Menjadi Dasar dan Prinsip Pengaturan Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu ?
2. Bagaimana Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Serta Konsekuensi Yuridis Dalam Hukum Positif dan Hukum Hindu ?

C. Metode Penelitian

penelitian hukum Normatif (*Normatif legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Efendi dan Jhonny, 2016: 123). Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan-peraturan Perundang-Undangan dan bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari aturan hukum tentang hak alimentasi anak terhadap orang tua.

D. Pembahasan

A. Apakah Yang Menjadi Dasar dan Prinsip Pengaturan Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu

Yang menjadi dasar dan prinsip pengaturan hak alimentasi anak terhadap orang tua yang di atur dalam Hukum Positif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2016 Perubahan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kewajiban orang tua terhadap anak di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, menyebutkan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal di atas menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang tua meskipun perkawinan antara orang tua telah putus, tetapi orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak-anaknya sampai ia dewasa atau telah kawin dan dapat berdiri sendiri.

Kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memang sudah sepantasnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada ibu-bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan. Timbulnya kewajiban untuk menghormati orang tua dikarenakan orang tua dengan begitu susah payah membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik hingga tumbuh menjadi anak yang tumbuh dewasa dan bisa beridiri sendiri. Sudah sewajarnya anak berterimakasih kepada orang tua dengan cara menghormatinya.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2016 Perubahan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Kewajiban anak untuk memberikan pemeliharaan kepada orang tuanya dengan menggunakan kata “memelihara” dalam istilah Hukum perdata dikenal dengan istilah alimentasi (hak pemeliharaan). Hak pemeliharaan atau alimentasi adalah kewajiban timbal balik antara orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan anak-anak beserta keturunannya.

Selain merujuk dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kitab KUHPerdata kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendala orang tersebut.

Lingkup rumah tangga ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persususan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Yang menjadi dasar dan prinsip pengaturan hak alimentasi anak terhadap orang tua yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal tersebut menegaskan setiap orang dilarang menelantarkan orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Yang dibahas disini adalah anak dilarang menelantarkan orang tuanya. Bahkan anak wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tua.

Menurut penulis Pasal 9 ayat (1) dan (2) telah jelas dan tegas mengatur setiap orang dilarang menelantarkan orang yang dalam lingkup rumah tangga. Dalam lingkup rumah tangga juga termasuk anak dan orang tua sehingga anak dan orang tua yang dibahas dalam penelitian ini juga termasuk lingkup rumah tangga. Dalam Pasal tersebut menegaskan secara jelas kewajiban untuk memberikan penghidupan, perawatan, dan pemeliharaan terhadap orang tua. Sehingga dalam Pasal tersebut sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan seorang anak yang telah dewasa untuk melaksanakan kewajibannya yang merupakan keharusan yang wajib.

Yang menjadi dasar dan prinsip pengaturan hak alimentasi anak terhadap orang tua juga diatur dalam Kitab Saramuscaya, Sloka 228, menyebutkan:

“Nihan singnggah anak, ikang caranang anātha, tumulung kadang doning çaktinya, dānākêna donya antuknya angarjana, pangenêning daridra donyan pasuruhan, ikang mangkana, yatikānak ngaranya”.

Artinya:

“Yang dianggap anak, adalah orang yang menjadi pelindung orang memerlukan pertolongan serta untuk menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan; untuk disedekahkan tujuannya, akan segala hasil usahanya; gunanya ia memasak menyediakan makanan untuk orang-orang miskin; orang yang demikian itu putra sejati namanya” (I Nyoman Kadjeng, dkk, 2003: 178).

Sloka saramuscaya di atas tegas menjelaskan bahwa seorang putra sejati yang dianggap anak harus menjadi pelindung dan memberikan pertolongan terhadap keluarga, kerabat dengan menyediakan makanan dan mendedekahkan hasil usahanya. Kaitan sloka di atas dengan kewajiban anak memenuhi hak alimentasi kepada orang tuanya sangat jelas menegaskan kewajiban anak dengan mempertegas wajib menyedekahkan, memberikan pertolongan serta perlindungan bagi orang tuanya. Seorang anak yang wajib memenuhi hak alimentasi kepada orang tua yaitu dalam sloka di atas di sebutkan bahwa yang disebut sebagai putra sejati.

Sebagai seorang anak sudah sepatutnya membalas budi semua jasa orang tua sebagai dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharmasastra, Sloka 228, anak tidak hanya menghormati orang tua namun membantu di saat Beliau sudah tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri, meberikan perawatan serta memelihara Beliau selagi masih hidup. Orang tua yang sudah tidak mampu bekaktivitas seperti saat di usia muda sangat mengharapkan kehadiran seorang anak yang selalu berbhakti kepada orang tuanya karena sangat mulia dan terpuji sebagai seorang anak yang selalu menjadikan orang tuanya hal yang paling penting dan utama seperti yang ditegaskan dalam Sloka 241 yang menyebutkan bahwa setia bhakti terhadap orang tua, dengan selalu menyenangkan hati orang tua dan membuat puas hati mereka, maka pahala yang di dapat sang anak sangatlah besar.

Jadi yang menjadi dasar dan prinsip pengaturan hak alimentasi anak terhadap orang tua dalam Hukum Hindu yang diatur dalam Kitab Saramuscaya sangat jelas menekankan bahwa seorang anak tidak hanya wajib menghormati orang tua tapi juga wajib berbhakti dan memelihara dengan cara memasak dan menyiapkan makanan bagi keluarga, kerabat yang sudah pasti

termasuk orang tua. Sehingga dalam Kitab Saramuscaya secara tegas mengatur bentuk pemeliharaan yang wajib dilakukan anak kepada kedua orang tuanya.

B. Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Serta Konkwensi Yuridis Dalam Hukum Positif dan Hukum Hindu

Konkwensi yuridis dalam hukum positif yang mengatur tentang hak alimentasi anak terhadap orang tua dalam hukum positif di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ada ditemukan peraturan yang jelas mengenai bagaimana sanksi bagi seorang anak yang tidak menaati kewajibannya terhadap orang tua. Bahkan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak terhadap orang tuanya pun tidak diatur secara tegas dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat ketegasan yang jelas dan adanya kekosongan norma mengenai kurangnya aturan yang mempertegas sanksi bagi anak yang tidak menaati kewajibannya itu.

Jadi menurut penulis konkwensi yuridis yang mengatur hak alimentasi anak terhadap orang tua dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Perkawin, tidak jelas dan terjadi kekosongan norma, dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak ada diatur bagaimana bentuk sanksi bagi seorang anak yang melalaikan kewajibannya itu. Jadi perlu adanya penambahan Norma yaitu perlu ditambahkan adanya sanksi tang tegas dalam Pasal 46 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Konkwensi yuridis anak terhadap orang tua juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kewajiban anak terhadap orang tua yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat jelas menegaskan bahwa seorang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga juga termasuk anak dilarang menelantarkan orang tua, bahkan berlaku bagi anak untuk memberikan penghidupan, perawatan serta

pemeliharaan bagi orang tua. Dalam pasal tersebut menegaskan secara jelas bagaimana bentuk kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Bahkan konsekuensi yuridis atau sanksi yang mengatur bagaimana jika anak tersebut menelantarkan atau melalaikan kewajibannya itu terdapat sanksi yang tegas dimana dituangkan dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ketegasan yang mengatur hak alimentasi anak terhadap orang tua dalam Pasal 9 ayat (1) dan semakin kuat dengan adanya sanksi yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuat Undang-Undang ini menjadi lebih tegas dan jelas. Dimana bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan anak terhadap orang tua menjadi jelas dan adanya sanksi yang tegas mengatur jika anak melalaikan kewajibannya itu.

Jadi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih tegas mengatur konsekuensi yuridis hak alimentasi anak terhadap orang tua dibandingkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdata. Dimana dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih jelas dijelaskan bagaimana bentuk kewajiban yang seharusnya dilakukan anak dan adanya sanksi yang tegas diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Konsekuensi yuridis anak terhadap orang tua dalam Hukum Hindu diatur dalam Kitab Saramuscaya diatur secara tegas bagaimana bentuk hukum karma yang akan didapat seorang anak yang durhaka atau anak yang lalai akan kewajibannya dan tidak menghormati orang tuanya sebagaimana diatur dalam Saramuscaya Sloka 234 yang menegaskan bahwa anak yang berkhianat pada orang tua sama dengan anak yang durhaka dan anak yang seperti itu akan mendapat dosa yang sama besarnya dengan dosa menggugurkan kandungan. Sangat jelas dalam Sloka tersebut menegaskan bahwa hukuman atau sanksi bagi anak yang durhaka pada orang tuanya akan mendapatkan dosa besar.

Selain itu dalam Saramuscaya Sloka 246 dijelaskan bagi anak yang berbhakti kepada orang tua menaati kehendak serta melindungi Beliau maka Surgalah yang akan dijumpai anak sebaliknya jika anak yang tidak taat dan durhaka terhadap kedua orang tua maka neraka yang akan ia dapat. Sesuai dengan hukum karma yang berlaku dalam ajaran Agama Hindu bahwa hukum karma akan tetap ada bagaimanapun bentuk perbuatan kita akan selalu dicatat dan akan menuai hasil sesuai dengan karma kita terdahulu. Sama halnya dengan bagi anak yang menganggap orang tuanya bagaikan musuh bahkan mengkhianati Beliau seperti yang diatur dalam Saramuscaya Sloka 247, menegaskan anak yang berkhianat pada orang tuanya akan mendapatkan duka nestapa serta akan membuat hidup anak menjadi sepi dan tidak ada apa-apa hidupnya akan menjadi kosong dan penuh kesengsaraan. Dalam sloka diatas menegaskan bahwa anak yang durhaka hingga menganggap orang tua bagaikan musuh akan mendapatkan hukuman karma sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yaitu akan mendapatkan kesengsaraan dan duka nestapa.

Jadi dalam Kitab Saramuscaya sangat jelas dijelaskan bahwa anak yang durhaka bahkan mengkhianati dan tidak berbhakti akan mendapat kesengsaraan, duka nestapa, hidup menjadi sepi serta dosa yang akan didapat adalah sama dengan dosa bagi orang yang menggugurkan kandungannya. Jadi sangat jelas bahwa hukum karma atau sanksi yang akan didapat anak bila durhaka terhadap orang tuanya.

E. Kesimpulan

1. Yang menjadi dasar dan prinsip pengaturan hak alimentasi anak terhadap orang tua terdapat dalam Hukum Positif yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 46 ayat (1) dan (2) tidak jelas mewajibkan bagi seorang anak yang telah dewasa untuk wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tuanya karna dalam Pasal tersebut

terdapat pengecualian dimana jika anak mampu untuk memberikan pemeliharaan itu. Sedangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih tegas menegaskan kewajiban seorang anak dimana dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut jelas menegaskan bahwa anak dilarang menelantarkan orang tuanya. Mereka wajib untuk memeberikan penghidupan, perawatan serta pemeliharaan bagi orang tuanya. Yang menjadi dasar dan prinsip pengaturan hak alimentasi anak terhadap orang tua dalam hukum hindu yang diatur dalam Kitab Manawa Dharmasastra juga sangat jelas dijelaskan dalam Kitab Saramuscaya dalam Sloka 228 yang menegaskan bahwa seorang anak tidak hanya diwajibkan hanya sekedar menghormati tapi juga mewajibkan anak untuk memenuhi kebutuhan orang tua dengan menyediakan makanan, meneyedekahkan hasil usahanya kepada orang tua.

2. Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua dan konskwensi yuridisnya Dalam Hukum Positif dan Hukum Hindu.Konskwensi yuridis hak alimentasi anak terhadap orang tua dalam hukum positif dalam Pasal 46 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada di atur sanksi bagi anak yang melallaikan kewajibanya. Begitu pula dalam KUHPerdata tidak terdapat sanksi yang mengatur bagi anak yang melallaikan kewajibanya terhadap orang tua. Berbeda dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal tersebut diatur secara tegas dan jelas bagaimana bentuk sanksi hukum jika anak yang tidak melaksanakan kewajibanya terhadap orang tuanya.Selain dalam hukum positif konskwensi yuridis dalam hukum hindu yang diatur dalam Kitab dalam Kitab Saramuscaya Sloka 238, yang menegaskan bahwa anak yang durhaka terhadap orang tuanya akan mendapatkan dosa. Dosa yang ia dapat sama dengan dosa menggugurkan kandungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku

- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Heri. 2014. *Keajaiban Berbakti Kepada Orang Tua*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Kadjeng, I Nyoman, dkk.2003. *Saramusccaya*. Jakarta: Pustaka Mitra Jaya.
- Meliala, Djaja S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Miswanto. 2015. *Kekawin Nitisastra*. Surabaya: Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut. 2015. *Hukum Peroroangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhardana, Komang. 2007. *Catur Guru Bhakti*. Surabaya: Paramita.
- Susanto, Ready. 2015. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bejana.
- Tyas, D.C. 2009. *Hak Dan Kewajiban Anak*. Jakarta: Afrin Finishing.
- Pramono. S. 2006. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Pudja.G dan Sudharta, Tjikorda Rai. 2002. *Manawa Dharma Sastra*. Jakarta:CV. Pelita Nusantara Lestari.

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Internet

- Islam, Syaiful. 2017. “ Data Kemensos”.
www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2017/08/05/337/1750328

[/data-kemensos-2-2-juta-lansia-di-indonesia-terlantar-dan-1-8-juta-lainnya-berpotensi-serupa](#), diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 17:00.

Putri, Rahmadani. 2018. “Kewajiban Anak Terhadap orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974”. <http://repository.uinsu.ac.id/5307/01/RAHMADANI%20PUTRI.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 16:00.

PLSA. 2020. “hidup sebatang kara, Nenek Ajariah”. www.opsintb.com/2020/02/hidup-sebatang-kara-nenek-ajariah.html?m=1, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 20:20.

Romadhon, Rizki. 2016. “ Sanksi kepada orang tua yang memberikan izin kepada anak menggunakan kendaraan bermotor”. www.google.com.jurnal-HK11277.pdf, diakses pada tanggal 30 Mei 2020 pukul 13:45.

Sari, Hepy Mandiana. 2019. “pemenuhan hak Alimentasi bagi orang tua di pondok al-ishlah kec. Blimbing kota Malang”. <http://repository.um.ac.id/88493/pdf>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 16:00.

Nurhadiani, Nadia.2015. “*Hak alimentsi bagi orang tua lanjut usia terlantar (studi kasus di panti Werdha Majapahit Kec. Sooko, Kab. Mojokerto)*”. <https://media.neliti.com/media/publications/35522-ID-hak-alimentasi-bagi-orang-tua-lansia-terlantar-studi-kasus-di-panti-werdha-majap.pdf>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 Pukul 13:00